

# Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

**Susilawati**

Dosen STIE STEMBI – Bandung Business School

**Lukman Hakim**

Peneliti Junior STIE STEMBI – Bandung Business School

## Abstrak

*Laporan keuangan pemerintah daerah dituntut untuk menyajikan informasi keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah baik secara simultan maupun parsial. Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian asosiatif. Jumlah sampel yang diteliti adalah 17 Dinas yang ada di Kabupaten Garut. Sampel dalam penelitian ini menggunakan sampling jenuh. Alat analisis yang dipakai adalah analisis path karena ada hubungan antar variabel independen. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan pengendalian internal berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.*

**Kata Kunci** : Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengendalian Internal, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

## PENDAHULUAN

PP No 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah mengatakan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat (p4(1)). Pengelolaan keuangan daerah tersebut dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Kemudian, dalam PP No 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi keuangan daerah menyebutkan dalam pasal 2 bahwa daerah menyampaikan informasi yang berkaitan dengan keuangan pemerintah daerah kepada pemerintah, dan juga dalam

pasal 3 disebutkan bahwa informasi keuangan daerah tersebut harus memenuhi prinsip-prinsip akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi tersebut dituangkan ke dalam laporan keuangan.

Dalam kerangka konseptual SAP disebutkan bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan tersebut terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan

ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Setiap tahun laporan keuangan pemerintah tersebut di atas diperiksa oleh BPK. Pemeriksaan atas LKPD khususnya bertujuan untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan pada, (a) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan atau prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan; (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*); (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas SPI. Dilihat dari tingkat pemerintahan, LKPD yang diperiksa pada semester I tahun 2013 terdiri atas 26 LKPD provinsi, 309 LKPD kabupaten, dan 80 LKPD kota. Opini LKPD Tahun 2012 untuk tiap-tiap tingkat pemerintah disajikan dalam tabel dibawah ini

menurut data dari IHPS BPK, 2013 terlihat bahwa pada tahun 2012 opini LKPD provinsi dan kota lebih baik dibandingkan dengan pemerintah kabupaten. LKPD pemerintah provinsi memperoleh opini WTP dan WDP sekitar 96% dari keseluruhan entitas provinsi, LKPD pemerintah kota memperoleh opini WTP dan WDP sekitar 95% dari keseluruhan entitas kota, dan LKPD pemerintah kabupaten sekitar 91% dari keseluruhan entitas kabupaten.

Informasi keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah memerlukan sistem akuntansi yang memadai. Mardiasmo (2009:26) menyatakan bahwa implikasi otonomi daerah terhadap akuntansi sektor publik adalah bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mampu memberikan informasi keuangan kepada publik, DPRD, dan pihak-pihak yang menjadi stakeholder pemerintah daerah. Untuk itu, pemerintah daerah perlu memiliki sistem akuntansi dan standar akuntansi keuangan pemerintah daerah yang memadai. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu melakukan perbaikan mekanisme audit terhadap instansi pemerintah daerah. Pengembangan sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan

suatu tantangan karena lingkungan sektor publik yang sangat kompleks membutuhkan kompetensi tersendiri untuk mendesain sistem akuntansi yang akan diterapkan.

PP No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah mengatakan bahwa sistem akuntansi pemerintah pada pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota yang mengacu pada pedoman umum sistem akuntansi pemerintah. Sistem akuntansi yang dirancang dan dijalankan dengan baik akan menjamin dilakukannya prinsip *stewardship* dan *accountability* dengan baik pula. Pemerintah atau unit kerja pemerintah perlu memiliki sistem akuntansi yang tidak saja berfungsi sebagai alat pengendalian transaksi keuangan, akan tetapi sistem akuntansi tersebut hendaknya mendukung pencapaian tujuan organisasi (Mardiasmo, 2009:143). Penerapan sistem akuntansi pemerintah menuntut adanya pemahaman yang utuh dari pelaksanaan manajemen keuangan daerah dan adanya penyempurnaan secara terus menerus dari instansi pemerintah daerah sebagai bagian dari pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat menjadi kenyataan (tim pokja evaluasi pembiayaan dan informasi keuangan daerah (KMK 355/KMK.07/2001). Mardiasmo (2009:20) mengatakan untuk mewujudkan *good governance* diperlukan reformasi kelembagaan (*institutional reform*). Reformasi kelembagaan menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintah di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya. Selain reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen sektor publik untuk mendukung terciptanya *good governance*, maka diperlukan serangkaian reformasi lanjutan terutama yang terkait dengan sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yaitu: (1) Reformasi sistem anggaran (*budgeting reform*), (2) Reformasi sistem akuntansi (*accounting reform*) (3) Reformasi sistem pemeriksaan (*audit reform*), (4) Reformasi sistem manajemen keuangan daerah (*Financial Management reform*). Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan uang rakyat (*public Money*) dilakukan secara transparan dengan

mendasarkan konsep *value for Money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*)

Salah satu kriteria pemberian opini adalah evaluasi atas efektivitas SPI. Pengendalian intern pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dirancang dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPI meliputi lima unsur pengendalian, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. SPI dinyatakan efektif apabila mampu memberikan keyakinan memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan entitas, keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lingkungan pengendalian yang diciptakan seharusnya menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan SPI yang didesain untuk dapat mengenali apakah SPI telah memadai dan mampu mendeteksi adanya kelemahan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengakui, sepanjang semester I-2013 hasil pemeriksaan BPK tercatat sebanyak 13.969 kasus kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan. Dalam hal ini BPK memeriksa 597 objek pemeriksaan, yang terdiri atas 519 objek pemeriksaan keuangan, 9 objek pemeriksaan kinerja dan 69 objek pemeriksa dengan tujuan tertentu (PDTT). Ketua BPK RI Hadi Poernomo mengatakan, dari total 13.969 kasus tersebut senilai Rp56,98 triliun. Sedangkan dari jumlah kasus tersebut, sebanyak 4.589 kasus senilai Rp10,74 triliun merupakan temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan. Sementara itu, sebanyak 5.747 kasus merupakan kelemahan SPI, sebanyak 2.854 kasus penyimpangan administrasi, dan sebanyak 779 kasus senilai Rp46,24 triliun merupakan temuan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. "Selama proses pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti temuan

ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan dengan penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara, daerah, perusahaan senilai Rp372,40 miliar". (**Hadi Poernomo 2013**).

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas 21 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten/kota yang ada di wilayah Jawa Barat (Jabar) untuk Tahun Anggaran (TA) 2012, meliputi delapan entitas yaitu Kota Depok, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bekasi, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Bogor. Terhadap LKPD Kota Depok, BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sedangkan terhadap 7 LKPD lainnya, BPK RI memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) (**BPK 2013**).

#### **Rumusan Masalah**

Penulis mengidentifikasi masalah berdasarkan pemaparan latar belakang di atas sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Seberapa besar pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Seberapa besar pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

#### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN & HIPOTESIS**

##### **Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

**Husein (2002:210)** menyebutkan bahwa: "*Sistem adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan dan saling bekerja sama untuk mencapai beberapa tujuan.*"

**Hall (2011:5)** mendefinisikan sistem sebagai berikut: "*a system is a group of to or more interrelated components or subsystem that serve a common purpose.*"

Menurut **Widyanto 2001** dalam (**Mardi 2011:4**), Sistem Informasi Akuntansi adalah susunan berbagai dokumen, alat komunikasi, tenaga pelaksana, dan berbagai laporan yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi keuangan, sedangkan menurut **Romney (2005)**, Sistem Informasi Akuntansi adalah sumber daya manusia dan modal dalam organisasi yang bertanggung jawab untuk (1) persiapan informasi keuangan, dan (2) informasi yang diperoleh dari mengumpulkan dan memproses berbagai transaksi perusahaan.

**Arif dkk (2002:3)** menyebutkan tentang pengertian akuntansi pemerintah:

*"Pengertian akuntansi pemerintah tidak terlepas dari pengertian akuntansi secara umum. Akuntansi didefinisikan sebagai aktivitas pemberian jasa (service activity) untuk menyediakan informasi keuangan kepada para pengguna (users) dalam rangka pengambilan keputusan. Untuk aktivitas tersebut, dilakukan suatu proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan yang timbul dari kegiatan suatu organisasi untuk menghasilkan informasi keuangan berupa posisi keuangan pada waktu tertentu, hasil kegiatan untuk periode yang berakhir pada waktu tertentu, disertai dengan suatu penafsiran atas informasi keuangan tersebut."*

Sistem akuntansi pemerintah menurut Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan organisasi pemerintah.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Permendagri No. 59 Tahun 2007).

Pengertian di atas disepakati oleh **Mardiasmo 2009** dalam (**Halim, 2012:322**) yang menjelaskan bahwa ruang lingkup akuntansi keuangan pemerintah meliputi semua kegiatan yang mencakup pengumpulan

data, penganalisisan, pengklasifikasian, pencatatan, dan pelaporan atas transaksi keuangan pemerintah sebagai suatu entitas, serta penafsiran terhadap hasil-hasilnya.

Kegiatan akuntansi pada unit kerja meliputi pencatatan atas pendapatan, belanja, aset dan selain kas. Keempat kegiatan akuntansi tersebut diatur melalui Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 *jo*. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, empat kegiatan akuntansi tersebut dijabarkan dalam empat prosedur akuntansi pemerintah, yaitu (1) prosedur akuntansi penerimaan kas, (2) prosedur akuntansi pengeluaran kas, (3) prosedur akuntansi selain kas, dan (4) prosedur akuntansi aset (**Halim, 2012:331**).

Indikator yang digunakan untuk mengukur Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, yaitu: (1) Tingkat Keakuratan (2) Tingkat Kelengkapan (3) Realtime (4) Kesesuaian Pencatatan (5) Tingkat Pengklasifikasian (6) Tepat Waktu.

### **Pengendalian Internal**

Menurut Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2008 sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan COSO mendefinisikan pengendalian internal sebagai berikut: pengendalian intern (*internal control*) adalah suatu proses, yang dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas, yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan dalam kategori keandalan laboran keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, efektivitas serta efisiensi operasi (**Boynton at all, 2002:37**).

Sedangkan menurut **IAPI 2011** dalam (**Agoes, 2012:100**), Pengendalian internal sebagai proses yang dijalankan oleh dewan

komisaris, manajemen dan personel lain atas entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektivitas dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum.

Tiga tujuan umum dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif (**Arrens, 2008:370**):

1. Realibilitas laporan keuangan. Manajemen memikul baik tanggung jawab hukum maupun profesional untuk memastikan bahwa informasi telah disajikan secara wajar sesuai dengan persyaratan pelaporan seperti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP). Tujuan pengendalian internal yang efektif atas pelaporan keuangan adalah memenuhi tanggung jawab pelaporan keuangan tersebut.
2. Efisiensi dan efektivitas operasi. Tujuan yang penting dalam pengendalian internal ini adalah memperoleh informasi keuangan dan nonkeuangan yang akurat tentang operasi perusahaan untuk keperluan pengambilan keputusan.
3. Ketaatan pada hukum dan peraturan. Section 404 mengharuskan semua perusahaan publik mengeluarkan laporan keuangan tentang keefektifan pelaksanaan pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Selain mematuhi ketentuan hukum dalam Section 404, organisasi-organisasi publik, nonpublik, dan nirlaba diwajibkan menaati berbagai hukum dan peraturan. Beberapa hanya berhubungan secara tidak langsung dengan akuntansi, seperti UU perlindungan lingkungan dan hak sipil, sementara yang lainnya berkaitan erat dengan akuntansi, seperti peraturan pajak penghasilan dan kecurangan.

Komponen pengendalian internal COSO meliputi hal-hal berikut ini (**Arrens, 2008:376**).

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko
3. Aktivitas pengendalian

4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan
- 6.

### **Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya (PP No 71 Tahun 2010).

Laporan keuangan adalah informasi keuangan yang disajikan dan disiapkan oleh manajemen dari suatu perusahaan kepada pihak internal dan eksternal, yang berisi seluruh kegiatan bisnis dari satu kesatuan usaha yang merupakan salah satu alat pertanggungjawaban dan komunikasi manajemen kepada pihak-pihak yang membutuhkannya (**Yadiati, 2010:52**).

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari aktivitas akuntansi. Laporan ini mengikhtisarkan data transaksi dalam bentuk yang berguna bagi pengambilan keputusan (**Pura, 2013:11**).

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dapat disimpulkan juga bahwa laporan keuangan merupakan alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan (**Hery, 2012:2**).

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 dalam (**Halim, 2012:266**), tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para

pengguna dalam membuat dan mengevaluasi ketentuan mengenai alokasi sumber daya.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut PP No 71 Tahun 2010 ada empat, yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

- a. Relevan
- b. Andal
- c. Dapat dibandingkan
- d. Dapat dipahami

### **Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X<sub>1</sub>) dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)**

Pada tahun 2002, Ikatan Akuntan Indonesia – Kompartemen Akuntansi Sektor Publik (IAI-KASP) telah mengembangkan serangkaian standar-standar akuntansi yang direkomendasikan untuk digunakan pada entitas sektor publik, yang dinamakan Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik (SAKSP). Dalam standar ini, IAI-KASP telah berusaha melakukan harmonisasi terhadap akuntansi, laporan keuangan, dan pemeriksaan antar yurisdiksi serta mana yang paling tepat, antar sektor publik dan swasta, serta untuk mengharmonisasikan laporan keuangan antara basis akuntansi dan basis ekonomi. Standar Akuntansi Sektor Publik (SAKP) dikembangkan sesuai dengan standar yang berlaku di tingkat internasional, dengan harapan dapat tercapainya informasi keuangan yang konsisten dan dapat dibandingkan (*comparable*) bagi semua yurisdiksi (**Bastian, 2010:125**).

Pengaruh akuntansi keuangan lebih mendominasi dalam perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia karena besarnya tuntutan publik kepada organisasi sektor publik (dalam hal ini adalah pemerintah) untuk lebih transparan dan akuntabel, dan sarana untuk mewujudkan transparansi publik dan akuntabilitas publik adalah dengan laporan keuangan pemerintah (**Halim, 2012:25**).

**Ratifah dan Ridwan (2012)**, menyatakan bahwa dalam penelitiannya menginformasikan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah yang berjalan efektif akan menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas.

**Yuliani dkk (2010)**, dalam penelitiannya memberikan informasi bahwa pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Banda Aceh. **Widyaningsih dkk (2011)**, menyebutkan dalam temuan penelitiannya bahwa tingkat keeratan hubungan kausalitas efektifitas sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian intern dengan kualitas informasi laporan keuangan memiliki tingkat hubungan yang cukup berarti.

### **Pengaruh Pengendalian Internal (X<sub>2</sub>) dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)**

Mulyadi 2001 dalam (**Darwanis dan Desi, 2009**) menyatakan bahwa, bagaimanapun baiknya struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, serta berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong praktik yang sehat, semuanya tergantung kepada manusia yang melaksanakannya. Mutu karyawan merupakan unsur sistem pengendalian intern yang paling penting. Jika perusahaan memiliki karyawan yang berkompeten dalam teknologi informasi dan jujur, serta bertanggung jawab pada bidangnya, maka perusahaan tersebut akan mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan.

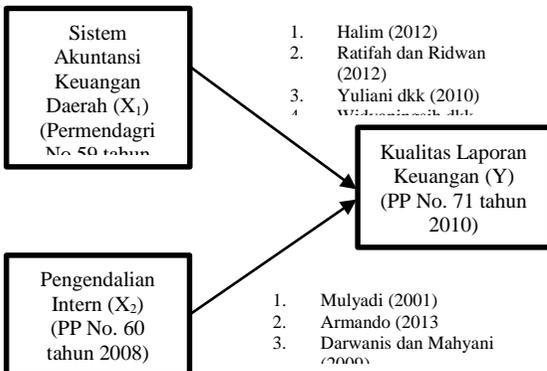
Berikut adalah beberapa hal penelitian terdahulu terkait pengendalian internal.

**Armando (2013)**, dalam penelitiannya menyatakan bahwa Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pada pemerintah Kota Bukittinggi. Di mana semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah maka semakin baik pula nilai informasi laporan keuangan pemerintah kota Bukittinggi. **Darwanis dan Mahyani (2009)**, Secara parsial variabel pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap peningkatan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

**Herawati (2014)**, menyatakan bahwa Terdapat pengaruh signifikan antara lingkungan pengendalian, penilaian resiko,

kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan terhadap kualitas laporan keuangan secara simultan; secara parsial, terdapat pengaruh signifikan antara lingkungan pengendalian, penilaian resiko, dan informasi dan komunikasi terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan urutan kerangka pemikiran di atas, maka dapat digambarkan model sebagai berikut.



**Gambar 1**  
**Model Penelitian**

**Hipotesis**

Berdasarkan kerangka pemikiran, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H1: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- H2: Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- H3: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

**OBJEK PENELITIAN DAN METODE PENELITIAN**

Objek penelitian pada dasarnya adalah *segala sesuatu yang berbentuk apa saja* yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013:95).

Adapun Objek yang diteliti dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel bebas (independen) yaitu, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X<sub>1</sub>), dan Pengendalian Internal (X<sub>2</sub>) serta satu variabel terikat (dependen) yaitu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu penelitian berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2013:35).

Penelitian ini juga menggunakan metode survey. Menurut Sugiyono (2013:81) bahwa penelitian survey merupakan penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini, tentang keyakinan, pendapat, karakteristik, perilaku, hubungan variabel dan untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel sosiologis dan psikologis dari sampel yang diambil dari populasi tertentu, teknik pengumpulan data dengan pengamatan (wawancara atau kuesioner) yang tidak mendalam, dan hasil penelitian cenderung untuk di generalisasikan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rumusan masalah asosiatif. Menurut Sugiyono (2013:92) rumusan masalah asosiatif adalah suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih.

Skala yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala likert. Menurut Sugiyono (2013:168) menyatakan bahwa skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari positif sampai negatif, yang berupa kata-kata antara lain: *Sangat Setuju / Selalu / Sangat Positif, Setuju / Sering / Positif, Ragu-ragu / Kadang-kadang / Netral, Tidak Setuju / Hampir Tidak Pernah Negatif, Sangat Tidak Setuju /*



k = jumlah variabel independen  
 R<sup>2</sup> = koefisien determinasi

Nilai F<sub>hitung</sub> di atas kemudian dibandingkan dengan nilai F dari tabel distribusi F Diana diperoleh nilai F<sub>tabel</sub> sebesar 3,74. Nilai F<sub>hitung</sub> di atas yaitu 0,61 ternyata lebih kecil dibandingkan F<sub>tabel</sub> (3,74). Sehingga dapat disimpulkan bahwa H<sub>0</sub> diterima. Dengan kata lain secara simultan berpengaruh tidak signifikan antara variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X<sub>1</sub>) dan Pengendalian Internal (X<sub>2</sub>) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) pada Dinas Kabupaten Garut.

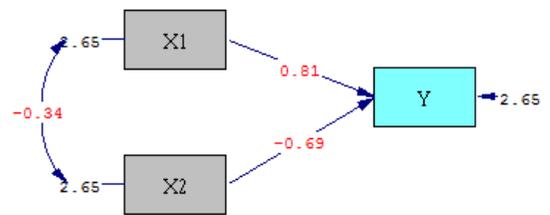
**Tabel 2**  
**Kesimpulan pengujian secara simultan**

Nilai Fhitung	Nilai Ftabel	Kesimpulan
0,61	3,74	Tidak signifikan

Sumber: Hasil perhitungan

**Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan (X<sub>1</sub>) dan Pengendalian Internal (X<sub>2</sub>) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) secara Parsial**

Untuk mengetahui pengaruh langsung secara individual, maka harus dilakukan uji t terlebih dahulu. Langkahnya terlebih dahulu harus dicari t<sub>hitung</sub> dari masing-masing X<sub>1</sub> dan X<sub>2</sub>. Setelah itu, nilai t<sub>hitung</sub> tersebut dibandingkan dengan dengan nilai t di tabel. Jika nilai t<sub>hitung</sub> lebih besar dibandingkan nilai t tabel maka hasilnya signifikan, artinya bahwa pengaruh yang terjadi dapat digeneralisir terhadap seluruh populasi Dinas Kabupaten Garut. Sebaliknya apabila nilai t<sub>hitung</sub> lebih kecil dibandingkan nilai t<sub>tabel</sub> maka tidak signifikan. Artinya, bahwa pengaruh yang terjadi tidak dapat digeneralisir terhadap seluruh populasi di dinas Kabupaten Garut. Berikut diagram jalur besarnya nilai thitung melalui software Lisrel 8.8:



**Gambar 3**  
**Nilai thitung X<sub>1</sub> dan X<sub>2</sub> terhadap Y**  
 sumber : Data Olahan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

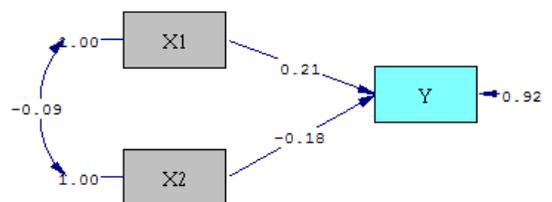
**Tabel 3**  
**Kesimpulan pengujian secara individual**

Variabel	Nilai t hitung	Nilai t tabel	Kesimpulan
X1	0,81	1,761	Tidak signifikan
X2	-0,69	1,761	Tidak signifikan

Sumber: Hasil perhitungan

Dari tabel di atas terlihat bahwa X<sub>1</sub> dan X<sub>2</sub> memiliki pengaruh yang tidak signifikan. Artinya pengaruh dari X<sub>1</sub> dan X<sub>2</sub> tidak dapat digeneralisir pada seluruh populasi di Dinas Kabupaten Garut.

Dengan *path analysis* kita dapat mengetahui pengaruh secara langsung dan tidak langsung setiap variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).



**Gambar 4**  
**Pengaruh X<sub>1</sub> dan X<sub>2</sub> terhadap Y**  
 sumber : Data Olahan

Dari gambar di atas dapat dihitung besarnya pengaruh dari masing-masing variabel. Adapun besarnya pengaruh yang terjadi dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Pengaruh X<sub>1</sub>**

$$\begin{aligned}
 \text{Pengaruh langsung} &= p_{yx1} \times p_{yx1} \\
 &= 0,21 \times 0,21 \\
 &= 0,0441
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pengaruh melalui } x_2 &= pyx_1 \times prx_1x_2 \times pyx_2 \\ &= (0,21) \times (-0,09) \times (-0,18) \\ &= 0,0034 \\ \text{Pengaruh total} &= 0.0441 + 0,0034 \\ &= 0.0475 \end{aligned}$$

**Pengaruh X2**

$$\begin{aligned} \text{Pengaruh langsung} &= pyx_2 \times pyx_2 \\ &= (-0,18) \times (-0,18) \\ &= 0,0324 \\ \text{Pengaruh melalui } X_1 &= pyx_2 \times rx_2x_1 \times pyx_1 \\ &= (-0,18) \times (-0,09) \times (0,21) \\ &= 0,0034 \\ \text{Pengaruh total} &= 0.0324 + 0.0034 \\ &= 0,0358 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Besarnya pengaruh masing-masing variabel**

Variabel	Pengaruh langsung	Pengaruh tidak langsung		Pengaruh total
		X1	X2	
X1	0,0441		0.0034	0,0475
X2	0,0324	0,0034		0,0352
Pengaruh total				0,0827

Sumber: Hasil perhitungan

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pengaruh total variabel Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Daerah (X<sub>1</sub>) terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah Daerah (Y) adalah sebesar 0,0475, dan Pengendalian Internal (X<sub>2</sub>) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) adalah sebesar 0,0872. Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat dikemukakan hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Daerah (X<sub>1</sub>) secara langsung menentukan perubahan-perubahan Kualitas laporan Keuangan (Y) sebesar 4,41% dan secara tidak langsung melalui hubungannya dengan Pengendalian Internal (X<sub>2</sub>) sebesar 0,34%.
2. Pengendalian Internal (X<sub>2</sub>) secara langsung menentukan perubahan-

perubahan Kualitas Laporan Keuangan (Y) adalah sebesar 3,24% dan secara tidak langsung melalui hubungannya dengan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X<sub>1</sub>) sebesar 0,34%.

**Implikasi Penelitian**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari dua variabel bebas yang diuji yaitu Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengendalian Internal yang memiliki pengaruh positif yaitu Penerapan Standar Akuntansi Keuangan daerah sedangkan Pengendalian Internal berpengaruh negatif tidak signifikan, pengaruh negatif tersebut dikarenakan data yang terkumpul sedikit. Secara parsial Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Daerah mempunyai pengaruh positif tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah, sedangkan Pengendalian Internal berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh **Ratifah dan Ridwan (2012)**, menyatakan bahwa dalam penelitiannya menginformasikan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah yang berjalan efektif akan menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas. **Yuliani dkk (2010)**, dalam penelitiannya memberikan informasi bahwa pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Banda Aceh. **Widyarningsih dkk (2011)**, menyebutkan dalam temuan penelitiannya bahwa tingkat keeratan hubungan kausalitas efektifitas sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian intern dengan kualitas informasi laporan keuangan memiliki tingkat hubungan yang cukup berarti.

Kemudian untuk pengaruh pengendalian internal tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh **Armando (2013)** yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan

pada pemerintah Kota Bukittinggi. Di mana semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah maka semakin baik pula nilai informasi laporan keuangan pemerintah kota Bukittinggi. **Darwanis dan Mahyani (2009)**, Secara parsial variabel pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap peningkatan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. **Herawati (2014)**, menyatakan bahwa Terdapat pengaruh signifikan antara lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan terhadap kualitas laporan keuangan secara simultan. Secara parsial, terdapat pengaruh signifikan antara lingkungan pengendalian, penilaian risiko, dan informasi dan komunikasi terhadap kualitas laporan keuangan.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mampu memberikan informasi keuangan kepada publik, DPRD, dan pihak-pihak yang menjadi stakeholder pemerintah daerah. Untuk itu, pemerintah daerah perlu memiliki sistem akuntansi dan standar akuntansi keuangan pemerintah daerah yang memadai. Sistem akuntansi keuangan yang berjalan efektif akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan, karena laporan keuangan tersebut telah terstandar dengan baik.

Banyak teori yang telah menyebutkan bahwa efektivitas pengendalian internal membuat sebuah laporan keuangan berkualitas. Walaupun dalam penelitian ini hasilnya berlawanan dengan berbagai teori yang ada dan berbagai hasil penelitian terdahulu, tetapi untuk meningkatkan keterandalan sebuah laporan keuangan salah satunya ialah dengan pengendalian internal yang berjalan dengan efektif. Pengendalian internal yang efektif membuat sebuah instansi dapat berjalan dengan baik, mencegah terjadinya berbagai pelanggaran, patuh terhadap peraturan yang ada dan laporan keuangan yang dibuatnya dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal pemerintahan, seluruh komponen instansi yang terdapat di dalamnya haruslah menjalankan pengendalian internal dengan efektif, dengan begitu informasi yang terdapat

dalam laporan keuangannya mempunyai kriteria di antaranya: andal, dapat dipahami, relevan dan dapat dibandingkan.

Berdasarkan pembahasan pada penelitian ini didapatkan sebuah kesimpulan yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menjelaskan tentang penerapan standar akuntansi keuangan daerah dan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan perintah daerah.

## KESIMPULAN

Penelitian mengenai penerapan Standar Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Penerapan standar akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pengendalian internal berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, terlihat bahwa penerapan standar akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Tetapi pengendalian internal memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan. Berikut saran yang diusulkan: Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebaiknya lebih memperlihatkan pengendalian internal dengan melakukan pendidikan dan pelatihan terhadap pegawai yang bertugas menyusun laporan keuangan agar tidak lagi terdapat salah saji dalam laporan keuangan. SDM yang kompeten di bidangnya pastilah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan, maka kedua variabel tersebut tidak cocok diterapkan pada dinas atau SKPD, untuk itu dalam penelitian selanjutnya disarankan surveinya dilakukan di atas tingkatan dinas atau di beberapa kabupaten atau kota. Selain itu juga disarankan untuk menambah variabel

lain di luar variabel yang telah diteliti seperti kualitas SDM, pemahaman akuntansi dan yang lainnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim. 2012. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arrens, Alvin A. Elder, Randal J, Beasley, Mark. 2008. *Auditing dan Jasa Assurance*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
- Bachtiar, Arif. 2002. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Boynton, William, Raymon N. Johnson dan Walter G. Kell. 2002. *Modern Auditing, Edisi Ketujuh* Jakarta: Erlangga.
- Deddi, Nordiawan. Ayuningtyas, Hertianti. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dwi, Martani. dkk. 2012. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hall, James A. 2011. *Accounting Information Systems, seventh Edition*. Mason. Cengage Learning
- Hery. 2012. *Akuntansi Keuangan Menengah*. Jakarta. PT Bumi Aksara.
- Husein, Muhammad Fahmi dan Wibowo, Amin. 2002. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN
- Indra, Bastian. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga
- Mardi. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Nanang, Kusnandar. Lies, Yulianti. 2007. *Modul Praktikum Statistik*. Bandung. STIE STEMBI Bandung.
- Rahman, Pura. 2013. *Pengantar Akuntansi 1 Pendekatan Siklus Akuntansi*. Jakarta: Erlangga.
- Riduwan. dan Engkos, Achmad Kuncoro. 2012. *Cara Menggunakan dan Memakai Path Analysis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sukrisno, Agoes. 2012. *Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.
- Winwin, Yadiati dkk. 2010. *Teori Akuntansi*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group
- Wuryan, Andayani. 2008. *Audit Internal*. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA
- Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah
- Aristanti, Widyaningsih. Alvian, Triantoro. Sugeng, Lili, Wiyantoro, 2011. Hubungan Efektifitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengendalian Intern Dengan Kualitas Akuntabilitas Keuangan: Kualitas Informasi Laporan Keuangan Sebagai Variabel Intervening, Simposium Nasional Akuntansi. Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh. (Dipublikasikan).
- Darwanis. Dwi Mahyani, Desi. 2009. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Tehnologi Informasi Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, Jurnal. Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh. (Dipublikasikan).
- Gerry, Armando. 2013. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah, Skripsi. Universitas Negeri Padang. Padang. (Dipublikasikan).
- Ifa, Ratifah. Mochamad, Ridwan. 2012. Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan, Jurnal. Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan. Bandung. (Dipublikasikan).
- Safrida, Yuliani. Nadirsyah. Usman, Bakar. 2010. Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

- Pemerintah Daerah, Jurnal. Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh. (Dipublikasikan).
- Tuti, Herawati. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan, Jurnal. STIE STEMBI. Bandung. (Dipublikasikan).
- Tutun Hermawanto, Botutihe. 2011. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Gorontalo, Skripsi. Universitas Negeri Gorontalo. (Dipublikasikan).
- BPK. 2013. *BPK RI Sampaikan LHP atas 21 LKPD Kabupaten/Kota*. <http://www.bpk.go.id>, 19 Juni 2013.
- BPK. 2013. *IHPS semester II*.
- Okezone. 2013. *Temukan 13.969 Kasus, BPK Sebut Ini Masih Kecil*. <http://www.okezone.com>, 01 Oktober 2013.